



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 2, No. 2
Juli-Desember 2018
Halaman: 11-23

Analisis Hubungan Pengeluaran Perkapita dan Status Gizi Buruk Terhadap Kemiskinan Dengan Pengaruh Wilayahn Provinsi Aceh Tahun 2015-2016

Awalurramadhana, Muhammad Zulhimli, Winny Dian Safitri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit 4 Juli 2018

Revisi 3 September 2018

Diterima 2 November 2018

Kata Kunci:

Per Capita Expenditure,

Malnutrition,

Poverty Status

ABSTRACT

This study aims to see the relationship of per capita expenditure and malnutrition status to poverty so that it can be seen pockets of poverty and malnutrition status problem in Aceh Province 2015-2016 year. This research uses correlation and determination analysis method, executed from February until June 2018. Data obtained from Central Bureau of Statistics (BPS) and analyzed by SPSS software. The result of the analysis shows that there is a positive correlation between per capita expenditure to poverty of 55.1% which means that there is an increase in expenditure variable per capita then there will be correlation with increasing poverty. Malnutrition status has negative correlation to poverty equal to -3.6% which means any improvement of malnutrition status is inversely proportional to poverty. Areas of poverty are grouped into two, namely areas with high per capita expenditure and high poverty rates are North Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Gayo Lues and Subulussalam. The second poverty areas of high nutritional status and high poverty rates are Aceh Barat Daya, North Aceh, Pidie and Subulussalam.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pengeluaran perkapita dan status gizi buruk terhadap kemiskinan sehingga dapat terlihat kantong kemiskinan dan masalah status gizi buruk di Provinsi Aceh tahun 2015-2016. Penelitian ini menggunakan metode analisis korelasi dan determinasi, dilaksanakan bulan Februari sampai bulan Juni 2018. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dianalisis dengan software SPSS. Hasil analisis menunjukkan ada hubungan positif pengeluaran perkapita terhadap kemiskinan sebesar 55,1% yang bermakna setiap ada peningkatan pada variabel pengeluaran perkapita maka akan ada hubungan dengan kemiskinan yang naik. Status gizi buruk mengalami hubungan yang negatif terhadap kemiskinan sebesar -3,6% yang bermakna setiap ada peningkatan status gizi buruk maka berbanding terbalik dengan kemiskinan. Daerah kemiskinan dikelompokkan menjadi dua yaitu, daerah dengan pengeluaran perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan tinggi adalah Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Gayo Lues dan Subulussalam. Daerah kemiskinan kedua yaitu status gizi buruk yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi.

1. PENDAHULUAN

Kondisi kemiskinan di Aceh pada tahun 2016 melalui survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu sebesar 841 ribu jiwa (10,79%) dari total jumlah penduduk Aceh sebesar 5.096 juta. Gambaran kemiskinan yang terjadi terlihat jelas diberbagai daerah, mulai dari jumlah pengemis yang bertambah banyak, jumlah rumah tangga miskin, jumlah anak yang putus sekolah hingga tingkat kerawanan pangan Aceh yang menjadi catatan penting bagi proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh pada umumnya, pemerintah kabupaten/kota pada khususnya. (BPS, 2016)

Kemiskinan di Aceh diukur dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya baik makanan maupun bukan makanan dari sisi pengeluaran per kapita masyarakat. Pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhinya diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pengeluaran perkapita masyarakat di Aceh yaitu sebesar Rp 8533,05 di bawah Garis Kemiskinan. Kemiskinan ini dijabarkan sebagai masalah yang paling penting untuk segera ditangani dan dianalisis secara spesifikasi yang harus segera diselesaikan. (BPS, Bappeda, 2016)

Faktor yang menyebabkan kemiskinan lainnya yaitu kesehatan ataupun gizi buruk yang melanda masyarakat. Rendahnya status gizi anak akan membawa dampak negatif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun diyakini bahwa kurang gizi berhubungan erat dengan kemiskinan. Dalam penelitiannya orang yang mengalami gizi buruk akan mengalami keterbelakangan

* Corresponding author: Awalurramadhana

E-mail address: awalurramadhana@gmail.com

pendidikan dalam penelitiannya anak-anak sekolah yang stunting (pendek) karena kurang gizi ternyata lebih banyak yang terlambat masuk sekolah, lebih sering absen, dan tidak naik kelas sehingga dapat mempengaruhi pendidikan yang menyebabkan pengangguran. (Purba, dkk, 2013)

Kemiskinan dalam Islam adalah suatu kondisi seseorang yang tidak mencukupi kebutuhannya tetapi tidak meminta-minta dalam memenuhi kebutuhan yang tidak tercukupi. Sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah r. a. Nabi Muhammad SAW bersabda “*Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far, ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Syarik bin Abu Namir bahwa Atha bin Yasar dan Abdurrahman bin Abu ‘Amrah Al-Anshari keduanya berkata; Kami mendengar Abu Hurairah r. a berkata; Nabi saw. bersabda: “Orang yang miskin bukanlah orang yang merasa telah cukup dengan satu atau dua buah kurma, atau sesuap atau dua suap makanan. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak meminta-minta dan menunjukkan kemiskinannya kepada orang lain. Jika kalian mau, bacalah firman Allah: “Mereka tidak meminta-minta kepada orang lain.”* (H. R. Al-Bukhari).

Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang harus diselesaikan dalam Islam sebagai wujud untuk terciptanya *Maslahah*. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali pemeliharaan *Ad-Dien* (Agama), *Nafs* (kehidupan atau jiwa), *Nasl* (Keturunan), *Mal* (harta atau kekayaan), *Aql* (akal). (Karim, 2014)

Islam mengajarkan jalan keluar untuk menghadapi kemiskinan dengan menyantuni mereka yang hidupnya dalam keadaan miskin sesuai dengan kemampuannya baik dengan materi maupun dengan mendorong pihak lain untuk ikut andil dalam menyantuninya sehingga kemiskinan pun teratasi.

2. TINJAUAN TEORITIS

Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (BPS, 2018).

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara (KBBI).

Menurut Chambers dalam Nasikun (2001), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, yaitu: pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup berkelanjutan.
- b. Kemiskina relatif, yaitu: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
- c. Kemiskinan kultural, yaitu: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. Kemiskinan struktural, yaitu: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan (Hidayat Syarif, 2015).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengategorikan orang miskin antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak miskin, mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610.
- b. Hampir tidak miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488 s/d. Rp 350.610 atau sekitar antara Rp 9.350 s/d. Rp11.687 per orang per hari. Jumlahnya mencapai 27,12 juta jiwa.
- c. Hampir miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740 s/d Rp 280.488 atau sekitar antara Rp 7.780 s/d Rp 9.350 per orang per hari. Jumlahnya mencapai 30,02 juta.

- d. Miskin, dengan pengeluaran per orang perbulan per kepala Rp 233.740 ke bawah atau sekitar Rp 7.780 ke bawah per orang per hari. Jumlahnya mencapai 31 juta.
- e. Sangat Miskin (kronis), tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah pastinya. Namun, diperkirakan mencapai sekitar 15 juta (Kholis, 2014).

Kemiskinan dapat diartikan sebagai orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dalam kategori *Dharuri(utama)*. Kemiskinan timbul disebabkan oleh minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor industri maupun pembangunan.

Islam menjelaskan kemiskinan sebagai salah satu masalah yang perlu diselesaikan, karena kemiskinan juga merupakan sebuah ancaman bagi kehidupan masyarakat yang perlu diberantas dengan solusi agar dapat diminimalisirkan. Dalam al-Quran dijelaskan pada Surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".(QS. At-Taubah [9]:60)

Menurut Abdul Hayy (1994) miskin pada ayat ini adalah seorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak mencapai nisab atau dapat dikatakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka atau orang-orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri tanpa ada bantuan (Kholis, 2014).

Pengentasan kemiskinan dalam Al-Qur'an yaitu dengan memberikan sumbangan secara hak dan kewajiban kepada masyarakat miskin. Hak dan kewajiban itu berupa kewajiban membantu dalam kebutuhan ekonomi mereka, yang merupakan hak mereka yang ditetapkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19 yang artinya:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Dalam harta mereka ada hak untuk (orang miskin yang meminta) dan yang tidak berkecukupan (walaupun tidak meminta)." (Q. S. Adz-Dzariyat [51]: 19).

Dalam ayat ini Allah menetapkan kewajiban membantu masyarakat miskin yang tidak berkecukupan. Kewajiban ini juga merupakan kewajiban pemerintah untuk mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting di antaranya adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah, atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber tersebut di atas belum mencukupi (Cahya, 2015).

Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga baik makanan maupun non-makanan selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (BPS, 2018).

Menurut Suyono (2010), Pengeluaran merupakan jumlah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Sedangkan Pengeluaran per kapita merupakan jumlah yang dikeluarkan secara tunai oleh pemerintah daerah baik secara rutin maupun belanja modal (Syaputra, 2013).

Adapun pengertian pengeluaran atau *Expenditure* adalah belanja pemerintah daerah dipengaruhi oleh populasi penduduk disuatu pemerintah daerah. Selain itu, jumlah penduduk yang tinggi dan menjadi beban yang tinggi bagi pemerintah daerah dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Halim dan Damayanti (2008, 5) dalam Suyono (2010) menyatakan bahwa jumlah belanja modal yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih banyak melakukan pengeluaran daerah akan dirasakan pada beberapa tahun setelah terjadi belanja modal tersebut. Pengaruh *Expenditure* ini telah dibuktikan oleh Steven dan McGowen (1983) terhadap kinerja keuangan pemerintah. Jadi, Pengeluaran per kapita merupakan proporsi antara jumlah total pengeluaran pemerintah daerah dengan jumlah penduduk di suatu pemerintah daerah tersebut (Syaputra, 2013).

Status Gizi

Status gizi adalah kondisi tubuh yang diakibatkan oleh konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Status gizi kurang yang cukup tinggi akan berefek kepada gizi yang buruk sehingga akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan kinerja perkembangan otak. Faktor penyebab terjadinya gizi buruk dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung gizi buruk meliputi kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi dan menderita penyakit

infeksi, sedangkan penyebab tidak langsung gizi buruk yaitu ketersediaan pangan rumah tangga, kemiskinan, pola asuh yang kurang memadai dan pendidikan yang rendah (Oktavia dkk, 2017).

Kesehatan gizi merupakan indikator yang penting terutama pada anak usia di bawah lima tahun karena mereka rentan terhadap kesehatan dan gizi. Gangguan gizi pada anak akan mempengaruhinya ketika mereka tumbuh dewasa. Status gizi yang kurang akan menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik, mempengaruhi kecerdasan dan produktivitas ketika dewasa (Handayani dkk, 2008).

Status Gizi Balita adalah keadaan kesehatan anak yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik energi dan zat-zat gizi lain yang diperoleh dari pangan dan makanan yang dampak fisiknya diukur secara antropometri, dan dikategorikan berdasarkan standar baku *World Health Organization -National Center Health Statistics, USA (WHO-NCHS)* dengan indeks berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan tinggi badan menurut tinggi badan BB/TB (Fajar, 2012).

Status gizi buruk pada balita dapat menimbulkan pengaruh yang dapat menghambat pertumbuhan fisik, mental maupun kemampuan berpikir. Balita yang menderita gizi buruk dapat mengalami penurunan kecerdasan (IQ) hingga sepuluh persen. Dampak paling buruk dari gizi buruk yaitu kematian pada umur yang sangat dini (Oktavia dkk, 2017).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis determinasi dan korelasi. Analisis ini berguna untuk melihat hubungan antar variabel dan pembagian kuadran pada analisis determinasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data indikator persentase tingkat kemiskinan, pengeluaran perkapita dan status gizi buruk dalam jangka waktu dua tahun 2015-2016.

Metode yang digunakan untuk menganalisis menggunakan metode korelasi dengan bantuan *software* Microsoft Excel, SPSS 20, dan menginterpretasikan dengan pengelompokan kemiskinan dengan *software* ArcGis.

Korelasi adalah metode untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan dua variabel atau lebih yang digambarkan oleh besarnya koefisien korelasi. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara +1 s/d -1. Koefisien korelasi tidak menggambarkan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, tetapi semata-mata menggambarkan keterkaitan linier antar variabel. Korelasi mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Kisaran Korelasi, kisaran (range) korelasi mulai dari 0 sampai dengan 1. Korelasi dapat bernilai positif dan juga dapat bernilai negatif.
- b. Korelasi Sama Dengan Nol, korelasi sama dengan 0 mempunyai arti tidak ada hubungan antara dua variabel.
- c. Korelasi Sama dengan Satu, korelasi sama dengan +1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna (membentuk garis lurus) positif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y juga naik. Korelasi sama dengan -1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna (membentuk garis lurus) negatif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y turun (dan sebaliknya).

Tahapan Penelitian

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mencari data status gizi buruk, pertumbuhan ekonomi per kabupaten/kota yang ada dibasis data BPS.
- b. Melakukan analisis deskriptif dari masing-masing variabel yaitu deskriptif tentang keadaan tingkat kemiskinan di Aceh, gizi buruk dan pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh.
- c. Melakukan analisis korelasi. Korelasi untuk mendapatkan model dan hubungan antar variabel terhadap variabel yang menjadi respon yaitu tingkat kemiskinan (Y).
- d. Membuat diagram kuadran untuk mengetahui kelompok-kelompok kemiskinan (Y).
- e. Menginterpretasikan hasil yang diperoleh dari pengelompokan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan menggunakan *mapping software* yaitu ArcGis.

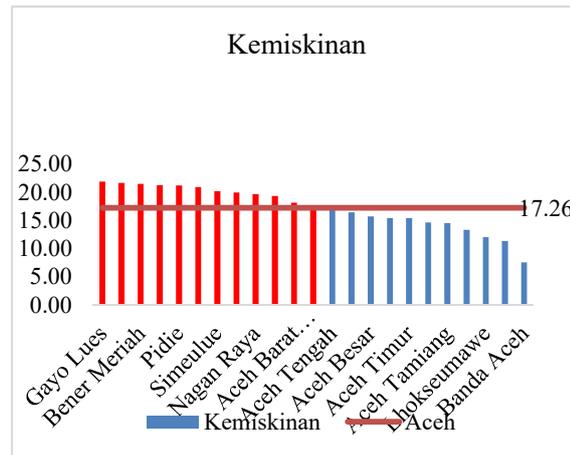
4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Rata-rata Persentase Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Aceh tahun 2015-2016

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan pokok sehingga tidak mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Windra, 2016). Kemiskinan di Aceh merupakan salah satu masalah dalam pembangunan yang harus diselesaikan

pemerintah sehingga terwujudnya *falah* (kesejahteraan) bagi masyarakat Aceh. Rata-rata kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada tahun 2015-2016 ditampilkan pada gambar berikut ini:

Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin menurut Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2016



Sumber: BPS (diolah)

Dari gambar tersebut terlihat rata-rata persentase penduduk miskin di Aceh tahun 2015-2016 sebesar 17,26% dari total penduduk Aceh (5,096 juta jiwa). Kabupaten Gayo Lues adalah daerah yang memiliki rata-rata persentase penduduk miskin yang tertinggi sebesar 21,91% dari total penduduk Aceh. Kabupaten Gayo Lues merupakan kabupaten yang terdiri dari dataran tinggi yang memiliki hasil kopi yang melimpah. Banyak wisatawan asing yang tertarik dan jatuh hati dengan kopi Gayo akan tetapi pendapatan masyarakat Gayo tidak mencukupi untuk mengolah kopi Gayo menjadi lebih baik. Sehingga terjadilah peningkatan angka kemiskinan.

Kabupaten Aceh Singkil, Bener Meriah dan beberapa Kabupaten/Kota lainnya dalam kelompok peringkat sepuluh besar tertinggi tingkat kemiskinannya menurut Kabupaten/Kota tersebut merupakan kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beberapa daerah pemekaran akan tetapi daerah-daerah tersebut tergolong dalam daerah miskin sementara daerah pertengahan yang memiliki sumber daya alam yang kurang menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan yang rendah di Aceh. Salah satu penyebab utama yaitu kurangnya modal untuk mengembangkan usahanya sehingga pemanfaatan sumber daya alam setempat kurang produktif.

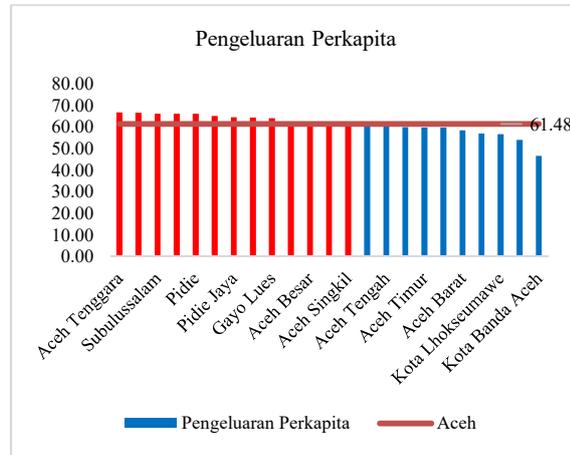
Kota Banda Aceh memiliki rata-rata persentase penduduk miskin rendah yaitu sebesar 7,57% dari tahun 2015-2016. Hal ini disebabkan Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang menjadi pusat perekonomian, kesehatan dan pendidikan. Selain Kota Banda Aceh, Kota Langsa dan Lhokseumawe juga memiliki persentase penduduk miskin yang rendah. Hal menariknya ketiga daerah tersebut merupakan kota madya yang memiliki sumber daya alam yang rendah akan tetapi sanggup membenahi masalah-masalah yang ada. Maka dengan demikian, ketiga daerah ini menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam mengatasi masalah yang ada.

Rata-rata persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh sebesar 17,26% dari tahun 2015 sampai 2016. Dalam gambar diatas juga dapat dilihat daerah-daerah yang berada persentase diatas rata-rata kemiskinan ada di Provinsi Aceh yaitu Gayo Lues, Aceh Singkil, Bener Meriah, Pidie Jaya, Pidie, Aceh Barat, Simeulue, Subulussalam, Nagan Raya, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, dan Sabang. Adapun daerah yang berada dibawah rata-rata persentase kemiskinan di Provinsi Aceh yaitu Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Aceh Selatan, Lhokseumawe, Langsa dan Banda Aceh.

Rata-rata Persentase Pengeluaran Perkapita di Kab/Kota Provinsi Aceh tahun 2015-2016

Pengeluaran perkapita menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan masyarakat yang berada di wilayah tertentu. Menurut Suyono (2010), pengeluaran perkapita adalah jumlah yang dikeluarkan secara tunai oleh pemerintah daerah baik secara rutin maupun belanja modal. Aceh merupakan salah satu provinsi dengan pengeluaran perkapita yang cukup tinggi yaitu sebesar 61,48% sekitar Rp 1,108,347. Berikut adalah gambaran rata-rata pengeluaran perkapita Aceh tahun 2015-2016.

Rata-Rata Pengeluaran Perkapita menurut Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2016



Sumber: BPS (diolah)

Dari gambar tersebut menunjukkan Kabupaten Aceh Tenggara merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki pengeluaran perkapita tertinggi sebesar 66,78% di atas rata-rata pengeluaran perkapita Provinsi Aceh. Pengeluaran perkapita Aceh Tenggara yang tinggi dikarenakan harga barang yang tinggi hal ini disebabkan oleh jarak Kabupaten Aceh Tenggara yang jauh dari Ibukota Provinsi. Tingginya pengeluaran perkapita suatu daerah belum tentu menjadi patokan daerah tersebut telah sejahtera karena dengan pengeluaran perkapita yang tinggi belum tentu daya beli masyarakat pun juga ikut tinggi.

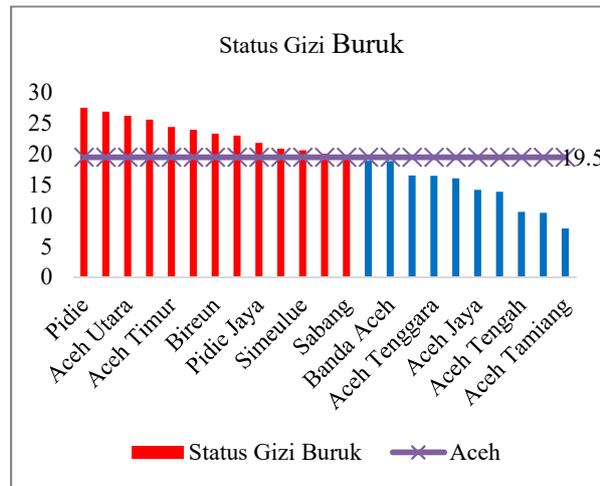
Kota Banda Aceh merupakan daerah yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita terendah di Provinsi Aceh tahun 2015-2016 yaitu sebesar 46,76%. Kota Banda Aceh memiliki pengeluaran perkapita rendah disebabkan oleh konsumsi rumah tangga yang baik.

Daerah yang berada persentase di atas rata-rata pengeluaran perkapita di Provinsi Aceh yaitu Aceh Tenggara, Aceh Jaya, Subulussalam, Aceh Utara, Pidie, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Besar, Nagan Raya dan Aceh Singkil. Adapun daerah yang berada dibawah rata-rata persentase pengeluaran perkapita di Provinsi Aceh antara lain Simeulue, Aceh Tengah, Aceh Barat Daya, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Barat, Sabang, Lhokseumawe, Langsa, Banda Aceh.

Rata-rata Persentase Status Gizi Buruk di Kab/Kota Provinsi Aceh tahun 2015-2016

Rahim (2014) menjelaskan bahwa gizi merupakan suatu tolak ukur kesehatan paling penting diperhatikan karena dapat mempengaruhi individu dalam masyarakat untuk menjamin kelangsungan hidup fundamental dalam kesehatan masyarakat. Oktavia (2017) menjelaskan ada dua faktor penyebab gizi buruk yaitu penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab gizi buruk langsung meliputi kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi dan menderita penyakit infeksi, sedangkan penyebab tidak langsung yaitu ketersediaan pangan rumah tangga, kemiskinan dan pendidikan rendah. Rata-rata status gizi buruk di provinsi Aceh sebesar 22,4% dari jumlah penduduk Aceh berdasarkan gambar berikut:

Rata-Rata Status Gizi Buruk menurut Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2016



Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan pada gambar tersebut menunjukkan status gizi buruk tertinggi dialami oleh daerah Pidie sebesar 27,55%. Tingginya status gizi buruk disebabkan asupan gizi dari komoditi makanan yang belum seimbang dan tercapai. Rata-rata status gizi buruk di Provinsi Aceh sebesar 19,5% dari tahun 2015 sampai 2016. Dalam gambar diatas juga dapat dilihat daerah-daerah yang berada persentase diatas rata-rata status gizi buruk di Provinsi Aceh yaitu Pidie, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Timur, Aceh Selatan, Bireuen, Subulussalam, Pidie Jaya, Nagan Raya, Simeulue, Langsa, Sabang. Adapun daerah yang berada dibawah rata-rata persentase status gizi buruk di Provinsi Aceh yaitu Aceh Barat, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tamiang.

Analisis Korelasi

Korelasi adalah pengukuran hubungan antar dua variabel atau lebih dengan melihat koefisien korelasi atau disebut kekuatan hubungan antar variabel. Berikut Korelasi antar variabel pengeluaran perkapita dan status gizi buruk dengan kemiskinan ditampilkan pada tabel berikut

Variabel	Kemiskinan	Pengeluaran Perkapita	Status Gizi Buruk
Kemiskinan	1	0,551	-0,036
Pengeluaran Perkapita	0,551	1	0,001
Status Gizi Buruk	-0,036	0,001	1

Pada tabel tersebut menerangkan korelasi kemiskinan dengan pengeluaran perkapita sebesar 0,551. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran perkapita dan kemiskinan sebesar 0,551 atau 55,1%. Korelasi antara kemiskinan dengan pengeluaran perkapita bernilai positif berarti terjadi hubungan yang positif, artinya jika pengeluaran perkapita tinggi maka kemiskinan akan naik, sebaliknya jika pengeluaran perkapita rendah maka kemiskinan akan menurun.

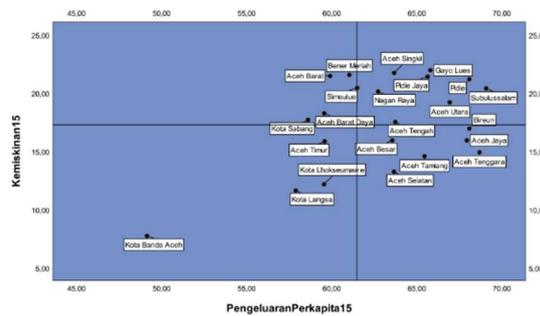
Korelasi kemiskinan dengan status gizi buruk sebesar -0,036. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara status gizi buruk dan kemiskinan sebesar 0,036 atau 3,6%. Korelasi antara kemiskinan dengan status gizi buruk bernilai negatif berarti terjadinya hubungan yang negatif, artinya jika status gizi buruk rendah maka kemiskinan akan naik, sebaliknya jika gizi buruk tinggi maka kemiskinan akan menurun.

Pengelompokan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Berdasarkan Pengeluaran Perkapita Tahun 2015

Pengelompokan tingkat kemiskinan bertujuan untuk melihat hubungan tingkat kemiskinan terhadap pengeluaran perkapita. Hal ini bertujuan untuk mengetahui Kabupaten/Kota penyebab kemiskinan Aceh menjadi naik secara signifikan sehingga dapat menjadi pola acuan pemerintah dalam memberantas kemiskinan.

Analisis kuadran digunakan untuk mengetahui kelompok kemiskinan berdasarkan pengeluaran perkapita. Analisis kuadran terbagi atas empat kuadran, yaitu kuadran pertama menunjukkan persentase kemiskinan dan pengeluaran perkapita yang tinggi, kuadran kedua menjelaskan persentase kemiskinan yang tinggi dan pengeluaran perkapita yang rendah, kuadran ketiga menggambarkan persentase kemiskinan yang rendah dan pengeluaran perkapita rendah dan kuadran keempat menerangkan persentase kemiskinan yang rendah dengan pengeluaran perkapita tinggi. Analisis kuadran persentase kemiskinan dan pengeluaran perkapita tahun 2015 ditampilkan pada gambar berikut ini:

Diagram Kelompok Persentase Kemiskinan dan Pengeluaran Perkapita Tahun 2015



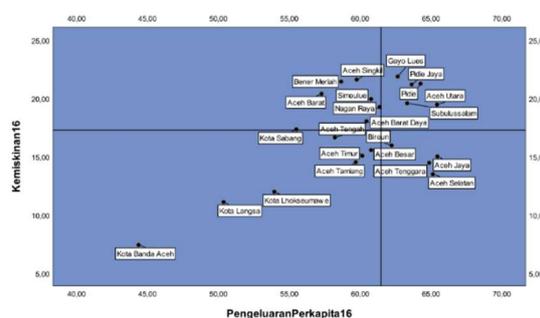
Pada diagram kuadran diatas dapat dilihat kelompok Kabupaten/Kota berdasarkan persentase kemiskinan dan pengeluaran perkapita.

- a. Kabupaten/kota pada kuadran pertama adalah Subulussalam, Pidie, Aceh Utara, Gayo Lues, Pidie Jaya, Aceh Singkil dan Nagan Raya
- b. Kabupaten/kota pada kuadran kedua meliputi Bener Meriah, Aceh Barat, Aceh Barat Daya dan Sabang.
- c. Kabupaten/kota pada kuadran ketiga adalah Aceh Timur, Lhokseumawe, Langsa dan Banda Aceh.
- d. Kabupaten/kota pada kuadran keempat yaitu Aceh Tenggara, Bireuen, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Selatan dan Aceh Besar.

Pengelompokan Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota berdasarkan Pengeluaran Perkapita Tahun 2016

Kelompok persentase kemiskinan berdasarkan pengeluaran perkapita tahun 2016 mengalami perubahan dari tahun 2016. Berikut merupakan gambar diagram kuadran kelompok persentase kemiskinan.

Diagram Kelompok Persentase Kemiskinan dan Pengeluaran Perkapita Tahun 2016



Pada diagram kuadran diatas dapat kita lihat ada empat kuadran yang menjelaskan hubungan tingkat kemiskinan dengan pengeluaran perkapita tahun 2016.

- a. Kabupaten/kota pada kuadran pertama adalah Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Subulussalam dan Gayo Lues.

- b. Kabupaten/kota pada kuadran kedua meliputi Nagan Raya, Simeulue, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Bener Meriah, Aceh Barat dan Sabang.
- c. Kabupaten/kota pada kuadran ketiga adalah Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Lhokseumawe, Langsa dan Banda Aceh.
- d. Kabupaten/kota pada kuadran keempat yaitu Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Bireuen.

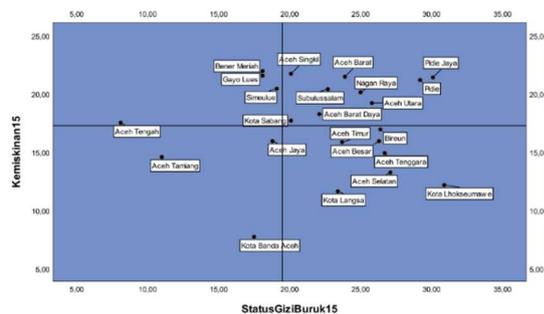
Berdasarkan pengelompokan kabupaten/kota diatas ada perpindahan kuadran dengan berkurangnya pengeluaran perkapita dan kemiskinan pada tahun 2015 dan 2016. Adapun kabupaten/kota yang berpindah adalah sebagai berikut:

- a. Kuadran 1, daerah pengeluaran perkapita pada tahun 2016 di Aceh berkurang dari sembilan kabupaten/kota menjadi lima kabupaten/kota. Daerah yang mengalami penurunan pengeluaran perkapita adalah Simeulue, Nagan Raya, Aceh Singkil dan Aceh Tengah.
- b. Kuadran 2, daerah pengeluaran perkapita pada tahun 2016 di Aceh bertambah dari empat kabupaten/kota menjadi tujuh kabupaten/kota. Daerah yang bertambah menjadi bagian dari kuadran kedua pada tahun 2016 adalah Simeulue, Nagan Raya dan Aceh Singkil.
- c. Kuadran 3, Kabupaten/kota Aceh Tamiang, Aceh Tengah dan Aceh Besar pada tahun 2016 mengalami penurunan tingkat kemiskinan dari tahun 2015.
- d. Kuadran 4, kabupaten/kota Bireuen, Aceh Tenggara dan Aceh Jaya pada tahun 2016 mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Sedangkan kabupaten Aceh Selatan mengalami peningkatan tingkat Kemiskinan dan pengeluaran perkapita dari tahun 2015.

Pengelompokan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Berdasarkan Status Gizi Buruk Tahun 2015

Pengelompokan tingkat kemiskinan bertujuan untuk melihat hubungan tingkat kemiskinan terhadap status gizi buruk. Hal ini bertujuan untuk mengetahui Kabupaten/Kota penyebab kemiskinan di provinsi Aceh menjadi acuan tolak ukur bagi pemerintah mengatasi permasalahan kemiskinan. Berikut adalah gambar pengelompokan kemiskinan berdasarkan status gizi buruk tahun 2015

Diagram Kelompok Persentase Kemiskinan dan Status Gizi Buruk Tahun 2015



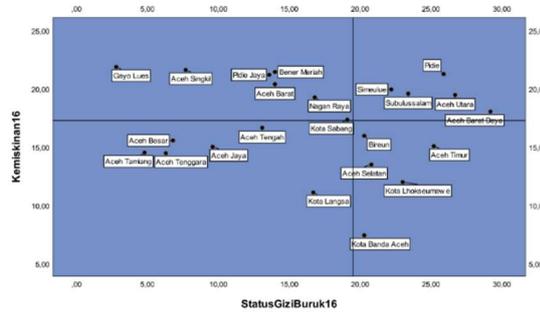
Pada diagram kuadran diatas dapat dilihat kelompok Kabupaten/Kota berdasarkan persentase kemiskinan dan status gizi buruk.

- a. Kabupaten/kota pada kuadran pertama adalah Pidie Jaya, Pidie, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Barat, Subulussalam, Aceh Barat Daya, Sabang dan Aceh Singkil
- b. Kabupaten/kota pada kuadran kedua meliputi Simeulue, Gayo Lues, Bener Meriah dan Aceh Tengah.
- c. Kabupaten/kota pada kuadran ketiga adalah Aceh Jaya, Banda Aceh dan Aceh Tamiang.
- d. Kabupaten/kota pada kuadran keempat yaitu Lhokseumawe, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Bireuen, Aceh Besar, Aceh Timur dan Langsa.

Pengelompokan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Berdasarkan Status Gizi Buruk Tahun 2016

Kelompok persentase kemiskinan berdasarkan status gizi buruk tahun 2016 mengalami perubahan dari tahun 2015. Berikut merupakan gambar diagram kuadran pengelompokan kemiskinan berdasarkan status gizi buruk.

Diagram Kelompok Persentase Kemiskinan dan Status Gizi Buruk Tahun 2016



Pada diagram kuadran diatas dapat dilihat kelompok Kabupaten/Kota berdasarkan persentase kemiskinan dan status gizi buruk.

- a. Kabupaten/kota pada kuadran pertama adalah Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Pidie, Subulussalam dan Simeulue.
- b. Kabupaten/kota pada kuadran kedua meliputi Sabang, Nagan Raya, Aceh Barat, Bener Meriah, Pidie Jaya, Aceh Singkil dan Gayo Lues.
- c. Kabupaten/kota pada kuadran ketiga adalah Langsa, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Besar, Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang.
- d. Kabupaten/kota pada kuadran keempat yaitu Aceh Timur, Lhokseumawe, Aceh Selatan, Bireuen dan Banda Aceh.

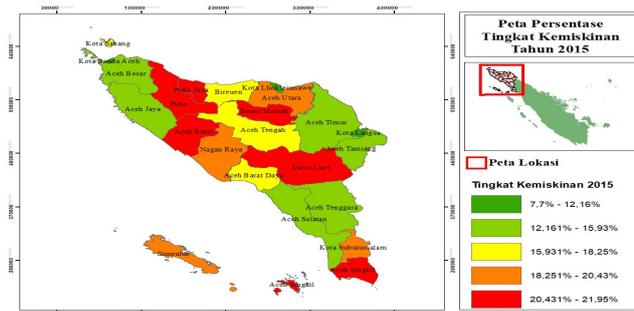
Berdasarkan pengelompokan kabupaten/kota diatas ada perpindahan kuadran dengan berkurangnya status gizi buruk dan kemiskinan pada tahun 2015 dan 2016. Adapun kabupaten/kota yang berpindah adalah sebagai berikut:

- a. Kuadran 1, daerah status gizi buruk pada tahun 2016 di Aceh berkurang dari delapan Kabupaten/kota menjadi lima Kabupaten/kota. Daerah yang mengalami penurunan status gizi buruk adalah Aceh Singkil, Aceh Barat, Sabang, Nagan Raya, Pidie Jaya.
- b. Kuadran 2, daerah status gizi buruk pada tahun 2015-2016 di Aceh bertambah dari empat Kabupaten/kota menjadi tujuh Kabupaten/kota. Daerah yang bertambah menjadi bagian dari kuadran kedua pada tahun 2016 adalah Nagan Raya, Aceh Singkil, Pidie Jaya, Aceh Barat dan Sabang
- c. Kuadran 3, Kabupaten/kota Aceh Tengah pada tahun 2016 mengalami penurunan tingkat kemiskinan dan kenaikan status gizi buruk. Kab/kota Langsa, Aceh Tenggara, Aceh Besar Aceh Tamiang dan Aceh Jaya mengalami kenaikan status gizi burk.
- d. Kuadran 4, Kabupaten/kota Bireuen, Aceh Selatan dan Lhokeumawe pada tahun 2016 mengalami penurunan status gizi buruk dilihat dari status 2016. Sedangkan Kab/kota Banda Aceh dan Aceh Timur mengalami peningkatan tingkat Kemiskinan dan pengeluaran perkapita dari tahun 2015-2016.

Peringkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase Kemiskinan

Persebaran tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh perlu dianalisis kembali untuk mengetahui tingkat kemiskinan Aceh yang ada pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh agar pemerintah mengetahui pergeseran kemiskinan di Provinsi Aceh di setiap tahunnya sehingga perlu dibuatkan sebuah peta. Berikut adalah gambaran persebaran kemiskinan Aceh berdasarkan peringkat Kabupaten/Kota pada data persentase kemiskinan Provinsi Aceh tahun 2015.

Peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan Persentase Sebaran Kemiskinan Tahun 2015



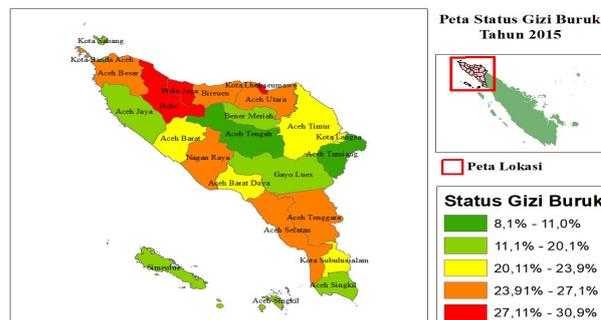
Berdasarkan gambar tersebut dapat ditarik beberapa kelompok Kabupaten/Kota menurut peringkat tingkat kemiskinan. Adapun peringkat tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Peringkat pertama adalah daerah yang berwarna merah dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi yaitu Aceh Singkil, Gayo Lues, Bener Meriah, Pidie dan Pidie Jaya.
- Peringkat kedua adalah daerah yang berwarna jingga dengan tingkat kemiskinan diatas rata-rata kemiskinan Aceh yaitu Subulussalam, Siemeulue, Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Utara.
- Peringkat ketiga adalah daerah yang berwarna kuning dengan tingkat kemiskinan berada pada rata-rata kemiskinan Aceh yaitu Bireuen, Aceh Tengah, Aceh Barat Daya dan Sabang.
- Peringkat keempat adalah daerah yang berwarna hijau muda dengan tingkat kemiskinan dibawah rata-rata kemiskinan Aceh yaitu Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Jaya, Bireuen dan Aceh Besar.
- Peringkat kelima adalah daerah yang berwarna hijau tua dengan tingkat kemiskinan yang paling rendah yaitu Langsa, Lhokseumawe dan Banda Aceh.

Peringkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Status Gizi Buruk

Persebaran gizi buruk di Provinsi Aceh perlu dianalisis kembali untuk mengetahui gizi buruk Aceh yang ada pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh agar pemerintah mengetahui pergeseran gizi buruk di Provinsi Aceh di setiap tahunnya sehingga perlu dibuatkan sebuah peta. Berikut adalah gambaran persebaran gizi buruk Aceh berdasarkan peringkat Kabupaten/Kota pada data persentase kemiskinan Provinsi Aceh tahun 2015.

Peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan Persentase Sebaran Statu Gizi Buruk Tahun 2015

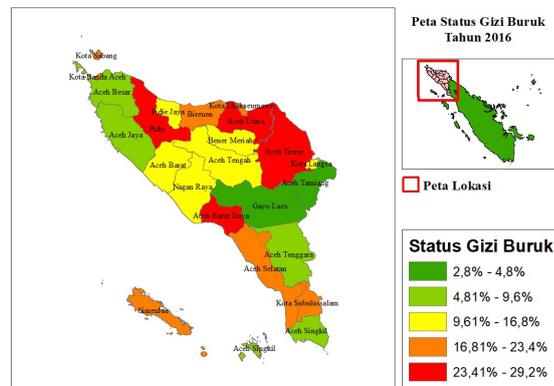


Berdasarkan gambar tersebut dapat ditarik beberapa kelompok Kabupaten/Kota menurut peringkat status gizi buruk. Adapun peringkat status gizi buruk di Provinsi Aceh tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Peringkat pertama adalah daerah yang berwarna merah dengan status gizi buruk yang paling tinggi yaitu Lhokseumawe, Pidie Jaya dan Pidie
- Peringkat kedua adalah daerah yang berwarna jingga dengan status gizi buruk diatas rata-rata status gizi buruk Aceh yaitu Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Utara, Bireuen dan Aceh Besar
- Peringkat ketiga adalah daerah yang berwarna kuning dengan status gizi buruk berada pada rata-rata status gizi buruk Aceh yaitu Subulussalam, Aceh Barat Daya, Langsa, Aceh Timur dan Aceh Barat.
- Peringkat keempat adalah daerah yang berwarna hijau muda dengan status gizi buruk dibawah rata-rata status gizi buruk Aceh yaitu Aceh Singkil, Simeulue, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Jaya, Banda Aceh dan Sabang
- Peringkat kelima adalah daerah yang berwarna hijau tua dengan tingkat kemiskinan yang paling rendah yaitu Aceh Tengah dan Aceh Tamiang.

Gambaran persebaran status gizi buruk di Provinsi Aceh menurut peringkat Kabupaten/Kota mengalami perubahan pada tahun 2016, dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan Persentase Sebaran Status Gizi Buruk Tahun 2016



Berdasarkan gambar tersebut dapat ditarik beberapa kelompok Kabupaten/Kota menurut peringkat status gizi buruk. Adapun peringkat status gizi buruk di Provinsi Aceh tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Peringkat pertama adalah daerah yang berwarna merah dengan status gizi buruk yang paling tinggi yaitu Aceh Barat Daya, Aceh Timur, Aceh Utara dan Pidie.
- Peringkat kedua adalah daerah yang berwarna jingga dengan status gizi buruk diatas rata-rata status gizi buruk Aceh yaitu Subulussalam, Simeulue, Aceh Selatan, Lhokseumawe, Bireuen, Banda Aceh dan Sabang
- Peringkat ketiga adalah daerah yang berwarna kuning dengan status gizi buruk berada pada rata-rata status gizi buruk Aceh yaitu Langsa, Nagan Raya, Aceh Tengah, Aceh Barat, Bener Meriah dan Pidie Jaya
- Peringkat keempat adalah daerah yang berwarna hijau muda dengan status gizi buruk dibawah rata-rata kemiskinan Aceh yaitu Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Jaya dan Aceh Besar.
- Peringkat kelima adalah daerah yang berwarna hijau tua dengan status gizi buruk yang paling rendah yaitu Gayo Lues dan Aceh Tamiang.

Kantong Kemiskinan Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat ditarik suatu benang merah bawah kantong kemiskinan Aceh ada pada Kabupaten/kota dengan peringkat tetap angka kemiskinan tertinggi dan penduduk miskin terbanyak yaitu Aceh Utara dan Pidie. Hal ini menggambarkan bahwa penyebab kemiskinan terbesar Aceh ada pada Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah penduduk miskin sebesar 111,44 ribu jiwa pada tahun 2015 dan 115,05 pada tahun 2016 sedangkan pada Kabupaten Pidie sebesar 88,22 ribu jiwa pada tahun 2015 dan 90,16 pada tahun 2016.

Pusat Terjadinya Gizi Buruk

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pusat terjadinya gizi buruk Aceh ada pada Kabupaten/kota Pidie dengan peringkat status gizi buruk tetap pada tahun 2015-2016. Hal ini menunjukkan bahwa penyebab gizi buruk terbesar di aceh ada di Kabupaten/kota Pidie sebesar 29,2% dari penduduk Aceh dengan kategori akut-kronis yaitu balita yang pendek kurang dari 20% dan kurus 5% pada tahun 2015 dan 25,9% dengan kategori akut-kronis pada tahun 2016.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari mengenai analisis determinan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2015-2016 sebagai berikut:

- Terdapat hubungan pengeluaran perkapita terhadap kemiskinan Provinsi Aceh tahun 2015-2016 sebesar 55,1% dan bernilai positif, artinya semakin tingginya pengeluaran perkapita maka kemiskinan akan naik. Sedangkan hubungan status gizi buruk terhadap kemiskinan Provinsi Aceh tahun 2015-2016 sebesar 3,6% dan bernilai negatif, artinya jika kemiskinan naik maka status gizi buruk akan turun.
- Pengelompokan kemiskinan berdasarkan pengeluaran perkapita terhadap persentase tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang tinggi dengan pengeluaran perkapita tinggi adalah Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Gayo Lues dan Subulussalam. Tingkat kemiskinan yang tinggi dengan status gizi buruk yang tinggi adalah Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Pidie dan Subulussalam.

3. Peringkat kemiskinan dengan tingkat persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten/Kota Aceh Singkil, Gayo Lues, Bener Meriah, Pidie dan Pidie Jaya.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan permasalahan yang belum terpecahkan sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain:

1. Pemerintah perlu memperbanyak program-program pemberdayaan masyarakat sehingga persentase kemiskinan akan turun dan membuat tingkat kemiskinan Aceh turun secara signifikan.
2. Dalam upaya mengurangi jumlah kemiskinan Aceh, pemerintah Aceh hendaknya menurunkan status gizi buruk masyarakat Aceh sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berefek kepada masyarakat miskin dengan peningkatan fasilitas kesehatan pada daerah pusat terjadinya status gizi buruk dan pada daerah status gizi buruk yang tinggi.
3. Penelitian ini dapat dikembangkan oleh para peneliti lain dengan menambahkan variabel penelitian dan periode data.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama RI. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Abidin, Z. (2012). Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi (telaah atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam atas Sistem Ekonomi Konvensional). *Al-Ihkam*, 1-12.
- Ali Khomsan, Arya H. Darmawan, Saharuddin, Alfiasari, Dadang Sukandar, Hidayat Syarif. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Almizan. (2016). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Kajian Ekonomi Islam*, 1-20.
- Ar-Rifa'i, M. N. (2000). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani.
- BPS. (2016, September 15). Profil Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Kemiskinan*, hal. 1-7.
- BPS. (2018). *Konsumsi dan Pengeluaran*. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/subject/5/konsumsi-dan-pengeluaran.html>: <https://www.bps.go.id>
- BPS, Bappeda. (2016). *Profil Pembangunan Aceh 2016*. Aceh: BPS.
- Cahya, B. T. (2015). Kemiskinan Ditinjau dari Perpekstif Al-Quran dan Hadis. *Jurnal Penelitian*, 1-25.
- Creisyne Cynthia Agustini, Nancy S.H. Malonda, Rudolf B. Purba. (2013). Hubungan Antara Status Gizi Dengan Prestasi Belajar Anak Kelas 4 dan 5 Sekolah Dasar di Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting Kota Manado. *Kesehatan*, 1-8.
- Handini, D. (2013). *Hubungan Tingkat Pendapatan Keluarga dengan Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Kalijambe*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Karim, A. A. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kholis, N. (2014). Pendidikan Islam dalam Usaha Mengatasi Kemiskinan. *Kependidikan*, 1-14.
- Oktavia, S., Widajanti, L., & Aruben, R. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Status Gizi Buruk Pada Balita di Kota Semarang Tahun 2017. *Kesehatan Masyarakat*, 186-192.
- Rahim, F. K. (2014). Faktor Risiko Underweight Balita Umur 7-59 Bulan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 115-121.
- Rahman Hidayat, R. W. (2017). Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Menggunakan Metode K-Means dan Fuzzy C-Means. *Seminar Nasional Pendidikan, Sains dan Teknologi FMIPA, Unimus*, 240-250.
- Silvera Oktavia, L. W. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Buruk pada Balita di Kota Semarang tahun 2017. *Jurnal Kesehatan*, 186-192.
- Susila, A. R. (2013). Analisis Sebaran Kemiskinan dan Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Lebak. *Optimisme Ekonomi Indonesia 2013*, 197-207.
- Syaputra, D. (2013). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Perkapita, Likuiditas, Struktur Hutang, Pajak, Real Estate dan Luas Wilayah Terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2010-2013. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 1-29.
- Walpole, R. E. (1992). *Pengantar Statistika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Windra, P. B. (2016). Analisis Pengaruh Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis*, 19-27.
- Zuhdiyaty, N. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus pad 33 Provinsi). *Jibeka*, 1-4.